



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
**UNIT KERJA** : PLN KANTOR PUSAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RIDHO HUTOMO
2. Jabatan : EXECUTIVE VICE PRESIDENT STRATEGI HUMAN CAPITAL
3. NHK : 199249

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>8.194.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/161 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HIBAH TANPA AKTA		Rp. 2.500.000.000
2. Bangunan Seluas 22 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI		Rp. 332.000.000
3. Bangunan Seluas 22 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI		Rp. 362.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 455 m2/178 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH TANPA AKTA		Rp. 5.000.000.000
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>629.000.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2015, LAINNYA		Rp. 169.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV/ 2.0 CVT Tahun 2021, LAINNYA		Rp. 460.000.000
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>40.000.000</b>
<b>D. SURAT BERTAHAP</b>	<b>Rp.</b>	<b>346.462.200</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>717.499.130</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>9.926.961.330</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>77.265.668</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>9.849.695.662</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.